



Analisis Kebijakan Standar Pembiayaan Pendidikan Guru Sekolah Dasar

Liska Ulandari¹, Ar Ridha², Dina Rozalita³, Rizki Ananda⁴, Ramdhan Witarsa⁵

^{1,2,3,4}Program Studi PGSD Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia

⁵Program Studi Magister Pendidikan Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai, Indonesia

Email: ¹ liskaulandari.13@gmail.com

² ridhaa469@gmail.com

³ dinarozalita21@gmail.com

⁴ rizkiananda.mhs.upi@gmail.com

⁵ drdadan19@gmail.com

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kebijakan standar pembiayaan pendidikan guru sekolah dasar. Metode penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan kajian literatur. Tahapan penelitian dilakukan mulai dari pengumpulan artikel, reduksi artikel, display artikel, pembahasan, dan kesimpulan. Sumber data penelitian berupa artikel-artikel jurnal nasional terakreditasi dalam 10 tahun terakhir (2013-2022). Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari 14 artikel didapatkan 4 artikel yang sesuai dengan topik judul. Standar pembiayaan pendidikan guru sekolah dasar perlu memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan terutama pada saat perencanaan dan realisasi pembiayaan. Prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran di pendidikan guru sekolah dasar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu pendidikan guru sekolah dasar. Pengelola pendidikan guru sekolah dasar perlu mencari sumber dana lain agar prasarana dan sarana pendidikan guru sekolah dasar semakin canggih dan bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya berdasarkan kebutuhan lapangan.

Kata kunci: Kajian Literatur; Kebijakan; Pendidikan Guru; Standar Pembiayaan.

Abstract. This study aims to describe the standard policy of financing primary school teacher education. This research method uses qualitative research methods with a literature review approach. The research stages were carried out starting from article collection, article reduction, article display, discussion, and conclusion. Sources of research data are articles from accredited national journals in the last 10 years (2013-2022). The results showed that from 14 articles, 4 articles were obtained that matched the title topic. Funding standards for primary school teacher education need to pay attention to the stages of financing management, especially during the planning and realization of financing. The principle of facility utilization needs to be considered for efficiency in the use of learning facilities in primary school teacher education in order to achieve learning objectives and improve the quality of primary school teacher education. Primary school teacher education managers need to find other sources of funding so that the infrastructure and facilities for primary school teacher education are more sophisticated and can facilitate students to develop their competencies based on field needs.

Kata kunci: Literature Review; Policies; Teacher Of Education; Standards Of Finances.

PENDAHULUAN

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya fakta bahwa banyak sekali

dokumen-dokumen kebijakan yang harus dipelajari dan dikuasai mahasiswa dalam kaitan mata kuliah kebijakan dan

problematika pendidikan dasar di Indonesia. Namun, dari sekian banyak dokumen kebijakan tersebut secara pelaksanaannya masih banyak yang tidak konsisten dan bahkan tidak diterapkan.

Apabila dari sekian banyak dokumen kebijakan tersebut tidak diterapkan, maka bukan tidak mungkin akan menimbulkan masalah lapangan dikemudian hari. Rendahnya implementasi kebijakan ini mungkin bisa jadi karena rendahnya sumber daya manusia yang paham akan adanya kebijakan. Padahal, suatu kebijakan muncul dan dibuat sebelumnya oleh para ahli dengan maksud dan tujuan agar sesuatu hal yang menjadi kebijakan bisa diterapkan dan meminimalkan suatu persoalan dikemudian hari.

Salah satu kebijakan yang harus dikuasai mahasiswa adalah kebijakan tentang standar pembiayaan. Standar pembiayaan merupakan standar yang mengatur komponen dan besarnya biaya operasi satuan pendidikan yang berlaku selama satu tahun. Standar pembiayaan mencakup biaya investasi satuan pendidikan, biaya personal, dan biaya operasi satuan pendidikan (Mesiono & Haidir, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Sudarmono et al. (2021) mengungkapkan bahwa pembiayaan pendidikan harus mengacu pada standar biaya-biaya satuan pendidikan yang telah ditetapkan oleh Peraturan Menteri berdasarkan usulan Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat dijadikan acuan dalam penyelenggaraan pendidikan disetiap jenjang Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di seluruh Indonesia. Begitu juga dengan standar di Pendidikan Guru Sekolah Dasar (PGSD) yang juga harus mengacu pada acuan yang telah ditetapkan pemerintah.

Penelitian dengan variabel standar pembiayaan di PGSD juga pernah dilakukan oleh Abdussalam, M. (2019) yang mengungkapkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan sangat berpengaruh terhadap fasilitas pembelajaran dan mutu suatu pendidikan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan betapa pentingnya standar pembiayaan PGSD dalam meningkatkan mutu. Hasil dari beberapa penelitian tersebutpun sejalan. Namun, yang menjadi menarik perhatian peneliti adalah tidak adanya analisis kebijakan standar pembiayaan PGSD secara nasional. Tidak ada artikel yang membahas tentang kebijakan standar pembiayaan PGSD terhadap kualitas PGSD. Beberapa artikel yang membahas kebijakan standar hanya berfokus pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Tidak spesifik menganalisis bagaimana keterkaitan kebijakan standar pembiayaan pada jenjang perguruan tinggi.

Beberapa artikel relevan tersebut adalah adanya perbedaan standar pembiayaan di setiap jenjang pendidikan. Ketertarikan tim peneliti juga tidak sampai disitu saja, namun juga terhadap kebijakan-kebijakan standar pembiayaan yang diterapkan pada jenjang pendidikan tersebut. Dari beberapa artikel tersebut, belum ada artikel penelitian yang membahas keterkaitan antara keduanya dan belum ada juga yang membahas keterkaitan antara satu artikel dengan artikel lainnya yang membahas kebijakan standar pembiayaan PGSD juga bagaimana cara para pemangku kebijakan dalam mengimplementasikannya untuk meningkatkan kualitas suatu satuan pendidikan yang dikelolanya. Hal inilah yang menggugah tim peneliti untuk melakukan penelitian analisis kebijakan standar pembiayaan PGSD untuk mendapatkan suatu kebaruan tentang standar pembiayaan yang diterapkan pada setiap jenjang pendidikan.

Penelitian melakukan analisis kebijakan standar pembiayaan PGSD ini sangat penting untuk dilakukan karena adanya ketidaksesuaian standar pembiayaan dengan prasarana dan sarana di lapangan. Rumusan masalah penelitian dalam artikel ini adalah bagaimana analisis kebijakan standar pembiayaan PGSD?. Tujuan penelitian dalam artikel ini adalah untuk mendeskripsikan kebijakan standar pembiayaan PGSD.

Diharapkan hasil penelitian ini akan memberikan manfaat bagi program studi PGSD sebagai masukan tambahan dokumen dalam merancang standar pembiayaan.

Penelitian ini diharapkan juga dapat memberi masukan kepada calon lulusan untuk meningkatkan kompetensinya sehingga menjadi lulusan yang berkualitas dan berpengaruh terhadap kemajuan karirnya di masa depan. Penelitian ini juga bisa dijadikan referensi baru untuk mengetahui keterkaitan teori antara satu dengan teori lainnya tentang standar pembiayaan diberbagai jenjang pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan adalah metode kajian literatur. Kajian literatur merupakan langkah pertama dan penting dalam penyusunan sebuah rencana penelitian. Kajian literatur adalah satu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai artikel jurnal yang berkaitan dengan topik penelitian untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu (Marzali, 2016).

Sebuah kajian literatur bisa digunakan untuk kepentingan menghasilkan sebuah tulisan ilmiah. Peneliti menjelajahi literatur-literatur yang berkaitan dengan masalah penelitiannya, tentang variabel-variabel penelitian yang pernah digunakan yang dihasilkan oleh peneliti lain berkaitan dengan topik penelitian yang akan peneliti teliti (Marzali, 2016).

Kajian literatur dilakukan atas kesadaran bahwa pengetahuan bertambah terus menerus dan mengalami perkembangan, variabel-variabel penelitian yang akan peneliti lakukan sudah pernah dirambah peneliti lain sebelumnya, dan peneliti dapat belajar dari apa yang telah dilakukan peneliti-peneliti sebelumnya tersebut (Subahan et al., 2021).

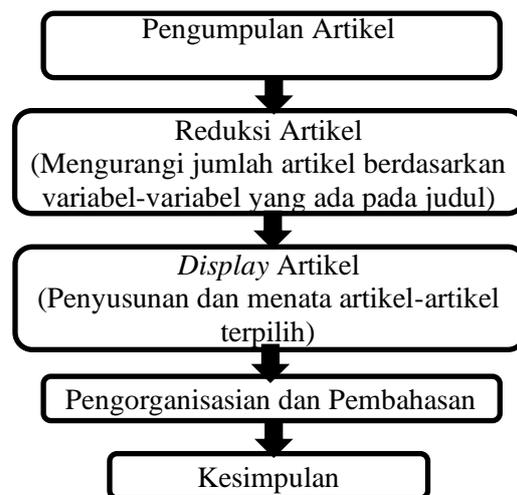
Dua tujuan utama dari kajian literatur. Pertama, kajian literatur dilakukan untuk menulis sebuah artikel untuk memperkenalkan kajian-kajian baru dalam topik tertentu yang perlu diketahui oleh mereka yang bergiat dalam topik ilmu tersebut. Kajian ini sewaktu-waktu dapat diterbitkan untuk kepentingan umum (Tjahjono, H., 2018).

Tujuan kedua dari kajian literatur adalah untuk kepentingan proyek penelitian sendiri, membuat kajian literatur untuk

memperkaya wawasan peneliti tentang suatu topik penelitian, menolong peneliti dalam memformulasikan masalah penelitian, dan menolong peneliti dalam menentukan teori-teori dan metode-metode yang tepat untuk digunakan dalam penelitian yang peneliti usung. Memelajari kajian-kajian hasil penelitian orang lain, peneliti dapat menentukan apakah akan meniru, mengulangi, atau mengeritik satu kajian tertentu. Dengan mengkritisi artikel-artikel hasil penelitian orang lain, peneliti lalu menciptakan sesuatu yang baru. Dalam artikel ini khusus akan dibincangkan kajian literatur untuk kepentingan penelitian sendiri, khususnya bagi mahasiswa yang belajar menulis suatu artikel ilmiah (Marzali, 2016).

Berdasarkan paparan tersebut, maka peneliti menggunakan kajian literatur dengan menganalisis artikel-artikel ilmiah dari jurnal nasional terakreditasi yang terbit pada tahun 2013-2022 sebagai metode penelitian agar terlaksananya penelitian yang dimaksud. Penelitian ini dilakukan di Perpustakaan Universitas Pahlawan di Jalan Tuanku Tambusai No.23, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Waktu penelitian pada semester genap 2021/2022.

Penelitian ini bersumber dari 14 artikel jurnal terakreditasi nasional yang membahas tentang kebijakan standar pembiayaan PGSD. Tahapan pelaksanaan penelitian pada kajian literatur dapat dilihat pada Gambar 1.



Gambar 1. Tahapan Pelaksanaan Penelitian
Sumber: Witarsa, 2022

- 1) Pengumpulan Artikel.
Peneliti mencari dan mengunduh artikel-artikel melalui *google scholar* dengan cara mengetikan kata-kata kunci yang berkaitan dengan topik atau judul penelitian. Kata-kata kuncinya adalah analisis kebijakan standar pembiayaan PGSD.
- 2) Reduksi Artikel (Mengurangi jumlah artikel berdasarkan variabel-variabel yang ada pada judul).
Reduksi artikel berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya serta membuang yang tidak perlu. Artikel yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan mencarinya apabila diperlukan.
- 3) *Display* Artikel (Penyusunan dan menata artikel-artikel terpilih).
Penyajian artikel ini dilakukan dalam bentuk tabel, uraian singkat, dan hubungan antar variabel.
- 4) Pengorganisasian dan Pembahasan
Tahap ini dilakukan pengorganisasian dan pembahasan berdasarkan jenis kajian literatur yang digunakan. Kajian literatur yang dipilih berupa kajian teori. Jenis kajian literatur berupa kajian teori ini adalah kajian khusus dimana penulis

memaparkan beberapa teori atau konsep yang terpusat pada satu topik tertentu dan membandingkan teori atau konsep tersebut atas dasar asumsi-asumsi, konsistensi logik, dan lingkup eksplanasinya.

- 5) Kesimpulan
Kesimpulan dilakukan berdasarkan hasil pengorganisasian dan pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahap awal pengumpulan artikel berdasarkan variabel-variabel yang terdapat pada judul, yaitu kebijakan standar pembiayaan dan PGSD, dari 14 artikel didapatkan 4 artikel yang sesuai dengan topik judul. Pada tahap reduksi artikel, terdapat 10 artikel yang harus dibuang dikarenakan terdapat satu variabel yang tidak sesuai dengan topik judul. Ke-10 artikel tersebut dibuang dengan alasan salah satu variabel yang ada pada topik judul tidak ada. Misalnya, ada artikel yang hanya membahas standar pembiayaan saja, namun tidak membahas PGSD, dan sebaliknya.

Artikel-artikel kebijakan standar pembiayaan PGSD yang berjumlah 4 artikel *display* artikelnya pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1. *Display* Artikel

No.	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Hasil
1	Abdussalam, M. (2019)	Analisis Ketercapaian Indikator Standar Pembiayaan pada SD Negeri Pamucatan Kabupaten Bandung Barat	Manajemen pembiayaan pendidikan di SDN Pamucatan rata-rata 80%-90% dari 16 indikator standar pembiayaan. Sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan realisasi pembiayaan. Prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah.
2	Aisyiah et al. (2020)	Kebijakan Standar Pembiayaan di Sekolah Dasar	Pembiayaan di SD tidak lepas dari beberapa persen dari pendapatan APBD dan APBN. Pembiayaan di SD ini sangat erat hubungannya dengan dana BOS.

No.	Penulis dan Tahun	Judul Artikel	Hasil
3	Ekowati, E. et al. (2019)	Manajemen Pembiayaan Pendidikan di SD Islam Ar Rahmah Kecamatan Suruh	Masing-masing sekolah berbeda jumlah uang yang didapatkan. Semua itu sesuai dengan keadaan jumlah siswa dan tingkatan pendidikannya. Semua itu sudah ada pada permendiknas yang sudah ditetapkan. Perencanaan anggaran pendidikan SD Islam Ar Rahmah disusun dan dituangkan dalam bentuk RAPBPT yang diadakan pada tiap akhir tahun dengan menetapkan semua program beserta anggaran masing-masing program. Mekanisme pengorganisasian pembiayaan pendidikan dimulai dari sumber dana itu sendiri. Pelaksanaan anggaran di SD Islam Ar Rahmah Suruh digunakan untuk pembiayaan program sekolah serta belanja barang dan jasa dan pengembangan. Pengawasan pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah dilakukan oleh yayasan Ar Rahmah Suruh dan dinas kependidikan.
4	Hartanti (2014)	Penerapan Standar Pembiayaan Pendidikan Inklusif sebagai Dasar Penyusunan Anggaran pada SD Pantara Tebet Jakarta	Anggaran pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam hal pendapatan, standar tenaga kerja, standar sarana dan prasarana, cadangan. Standar pendukung yang ada mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, karena kontribusi dari para donatur, sehingga mengurangi biaya standar pendukung.

Sumber: Peneliti, 2022

Artikel 1 yang ditulis oleh Abdussalam, M. (2019) mengungkapkan bahwa manajemen pembiayaan pendidikan di SDN Pamucatan rata-rata 80%-90% dari 16 indikator standar pembiayaan. Sekolah agar memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan pendidikan terutama pada saat perencanaan dan realisasi pembiayaan. Prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu sekolah. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang diungkapkan oleh Atmaja, RM., T. et al. (2016) dan Kusuma, Y. & Sumianto (2022) bahwa prioritas anggaran pendidikan terbesar adalah untuk membayar gaji guru/pegawai, yaitu antara 75-80% dari

total anggaran, dan selebihnya untuk non guru.

Artikel 2 yang ditulis oleh Aisyiah et al. (2020) mengungkapkan bahwa pembiayaan di SD tidak lepas dari beberapa persen dari pendapatan APBD dan APBN. Pembiayaan di SD ini sangat erat hubungannya dengan dana BOS. Masing-masing sekolah berbeda jumlah uang yang didapatkan. Semua itu sesuai dengan keadaan jumlah siswa dan tingkatan pendidikan. Semua itu sudah ada pada permendiknas yang sudah ditetapkan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Mesiono & Haidir (2020) bahwa kebijakan pemerintah dengan menggulirkan dana BOS di tingkat sekolah harus transparan agar tercipta

akuntabilitas. Jika dapat dipertanggung jawabkan, maka kredibilitas lembaga pendidikan tersebut akan meningkat. Jika kredibel, maka dengan sendirinya akan meningkatkan kualitas institusi pendidikan. Untuk mencapai hal tersebut, maka pemerintah mengatur tentang standar pembiayaan berjangka.

Artikel 3 yang ditulis oleh Ekowati, E. et al. (2019) mengungkapkan bahwa perencanaan anggaran pendidikan SD Islam Ar Rahmah disusun dan dituangkan dalam bentuk RAPBPT yang diadakan pada tiap akhir tahun dengan menetapkan semua program beserta anggaran masing-masing program. Mekanisme pengorganisasian pembiayaan pendidikan dimulai dari sumber dana itu sendiri. Pelaksanaan anggaran di SD Islam Ar Rahmah Suruh digunakan untuk pembiayaan program sekolah serta belanja barang dan jasa dan pengembangan. Pengawasan pembiayaan pendidikan di SD Islam Ar Rahmah dilakukan oleh yayasan Ar Rahmah Suruh dan dinas kependidikan. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang diungkapkan oleh Atmaja, R.M., T. et al. (2016); Jaelani et al. (2021); Aflaha et al. (2021); Nurhaco et al. (2021); Masditou (2017); dan Azhari, U. & Kurniady, D. (2016) bahwa penyusunan biaya pendidikan melalui Rencana Anggaran Biaya (RKA) dan Rancangan Anggaran Belanja Pendapatan Sekolah (APBD) dibahas dalam rapat anggaran di DPRK. Penggunaan biaya anggaran pendidikan bersumber dari APBN, dan anggaran serta sumber lain.

Artikel 4 yang ditulis oleh Hartanti, (2014) mengungkapkan bahwa anggaran pendidikan mengalami peningkatan setiap tahunnya dalam hal pendapatan, standar tenaga kerja, standar sarana dan prasarana, cadangan. Standar pendukung yang ada mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya karena kontribusi dari para donatur sehingga mengurangi biaya standar pendukung. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan hasil-hasil penelitian yang diungkapkan oleh Sudarmono et al. (2021) dan Ferdi, W. (2013) bahwa penerapan standar pembiayaan berdasarkan PP No. 19/2005 berimplikasi pada kebutuhan untuk merumuskan standar pembiayaan yang meliputi standarisasi komponen biaya

pendidikan yang meliputi biaya operasional, biaya investasi dan biaya pribadi. Standar satuan biaya pendidikan ditetapkan dengan Peraturan Menteri berdasarkan usulan dari Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP). Standar pembiayaan pendidikan ini diharapkan dapat menjadi acuan dalam penyelenggaraan pendidikan pada setiap jenjang pendidikan di seluruh Indonesia karena manfaatnya yang begitu luas dan meresap diberbagai bidang. Pembiayaan pendidikan harus menjadi perhatian utama pemerintah dan masyarakat.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil kajian literatur tentang kebijakan standar pembiayaan PGSD dapat disimpulkan bahwa dari 14 artikel jurnal terakreditasi nasional yang terbit pada tahun 2013-2022 didapatkan 4 artikel yang sesuai dengan variabel-variabel yang ada di judul. Standar pembiayaan PGSD perlu memperhatikan tahapan manajemen pembiayaan terutama pada saat perencanaan dan realisasi pembiayaan. Prinsip pemanfaatan fasilitas perlu diperhatikan efisiensi terhadap penggunaan fasilitas pembelajaran di PGSD agar dapat mencapai tujuan pembelajaran dan meningkatkan mutu PGSD. Pengelola PGSD perlu mencari sumber dana lain agar prasarana dan sarana PGSD semakin canggih dan bisa memfasilitasi mahasiswa untuk mengembangkan kompetensinya berdasarkan kebutuhan lapangan.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdussalam, M., R. (2019). Analisis Ketercapaian Indikator Standar Pembiayaan pada SD Negeri Pamucatan Kabupaten Bandung Barat. *Jurnal Profesi Keguruan*, 5(1), 55–59.
- Aflaha, A., Purbaya, D., Juheri, D., & Barlian, U., C. (2021). Analisis Standar Pembiayaan Pendidikan. *Masile: Jurnal Studi Ilmu Keislaman*, 1(1), 24–59.
- Aisyiah, S., Marsyidin, S., & Sabandi, A. (2020). Kebijakan Standar

- Pembiayaan di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(2), 153–157. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v2i2.121>
- Atmaja, RM., T., E., Harun, C., Z., & Ibrahim, S. (2016). Analisis Penetapan Standar Biaya Pendidikan pada SMA Negeri 2 Kuala Kabupaten Nagan Raya. *Jurnal Administrasi Pendidikan Pascasarjana Universitas Syiah Kuala*, 4(1), 119–128.
- Azhari, U., L., & Kurniady, D., A. (2016). Manajemen Pembiayaan Pendidikan, Fasilitas Pembelajaran, dan Mutu Sekolah. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, XXIII(2), 26–36.
- Ekowati, E., T., Sunandar, & Nyoman, N., A. (2019). Manajemen Pembiayaan Pendidikan di Sekolah Dasar Islam Ar Rahmah Kecamatan Suruh. *Jurnal Manajemen Pendidikan (JMP)*, 8(1), 1–21.
- Ferdi, W., P. (2013). Pembiayaan Pendidikan: Suatu Kajian Teoritis Financing of Education: A Theoretical Study. *Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 19(4), 565–578.
- Hartanti. (2014). Penerapan Standar Pembiayaan Pendidikan Inklusif sebagai Dasar Penyusunan Anggaran pada SD Pantara Tebet Jakarta. *Jurnal Moneter*, 1(2), 181–192.
- Jaelani, A., Sahudi, Supiana, & Zaqiah, Q., Y. (2021). Kebijakan Standar Pembiayaan dalam Dunia Pendidikan. *Ar-Risalah: Media Keislaman, Pendidikan Dan Hukum Islam*, XIX(1), 128–140.
- Kusuma, Y., Y., & Sumianto. (2022). Analisis Standar Pengelolaan Pendidikan Anak Sekolah Dasar di Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. *IRJE: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 2(1), 40–46.
- Marzali, A. (2016). Menulis Kajian Literatur. *Jurnal Etnosia*, 1(2), 27–36.
- Masditou. (2017). Manajemen Pembiayaan Pendidikan Menuju Pendidikan yang Bermutu. *Jurnal Ansiru PAI*, 1(2), 119–145.
- Mesiono, & Haidir. (2020). Manajemen Pembiayaan Pendidikan (Analisis Konsep dan Implikasinya terhadap Peningkatan Mutu Pendidikan). *Jurnal Hikmah*, 17(2), 61–73.
- Nurhaco, Yunus, M., Radjab, A., M., & Yahya, M. (2021). Pengaruh Pembinaan Manajerial Kepala Sekolah terhadap Standar Pembiayaan pada Sekolah Luar Biasa. *Jurnal Basicedu*, 5(6), 6134–6143.
- Subahan, A., Dista, D., X., & Witarsa, R. (2021). Kajian Literatur tentang Kebijakan Pendidikan Dasar di Masa Pandemi dan Dampaknya terhadap Pembelajaran. *Jurnal Review Pendidikan Dan Pengajaran*, 4(1), 1–9.
- Sudarmono, S., Hasibuan, L., & Us, K., A. (2021). Pembiayaan Pendidikan. *Jurnal Manajemen Pendidikan Dan Ilmu Sosial*, 2(1), 266–280.
- Tjahjono, H., K. (2018). Studi Literatur Pengaruh Keadilan Distributif dan Keadilan Prosedural Pada Konsekuensinya Dengan Teknik Meta Analisis. *Jurnal Psikologi*, 35(1), 21–40.
- Witarsa, R. (2022). *Penelitian Pendidikan* (M. Lanjarwati (ed.); Pertama). Deepublish Publisher.